Lusia Kareri Hara_2022110066

by UNITRI Press

Submission date: 15-Apr-2026 01:39PM (UTC+0900)
Submission ID: 2932503599
File name: Lusia_Kareri_Hara_2022110066.docx (2.9M)
Word count: 1273
Character count: 9116

ANALISIS PENERAPAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 PADA DESA MULYOAGUNG KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

LUSIA KARERI HARA

2022110066

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2026

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji bagaimana konsep transparansi dan akuntabilitas digunakan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik kualitatif dengan pendekatan deskriptif, meliputi observasi, wawancara, dan perekaman. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa konsep transparansi dan akuntabilitas umumnya telah diterapkan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti kualitas sumber daya manusia yang rendah, keterlambatan penyusunan laporan, serta perubahan regulasi yang membutuhkan penyesuaian berkelanjutan. Peningkatan keterlibatan masyarakat serta optimalisasi media informasi publik masih diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

***Kata Kunci**: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Good Governance.*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan inisiatif masyarakat, hak leluhur, dan/atau hak tradisional, struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat lokal. Desa diakui sebagai komunitas hukum dengan batas wilayah dan kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi urusan publik.

Desa-desa sangat penting bagi pengendalian dan pengelolaan urusan pemerintahan, termasuk pemberdayaan desa, pembangunan, tata kelola, dan pengembangan masyarakat, karena kewenangan yang diberikan secara konstitusional kepada mereka. Melalui administrasi regional, pemerintah federal juga menyediakan dana kepada masyarakat untuk membantu program-program ini. Berbagai upaya, seperti administrasi pemerintahan, pengembangan infrastruktur, pembangunan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, didukung oleh dana ini. Pengelolaan aset desa juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang mempromosikan kepentingan umum, kejelasan hukum, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas untuk memaksimalkan keuntungan finansial bagi masyarakat desa.

Menurut Musyaffi dkk. (2025), konsep akuntabilitas dan transparansi harus digunakan dalam administrasi keuangan desa untuk memfasilitasi akses publik dan penerimaan informasi tentang pengelolaan dana desa. Kewenangan untuk

mengawasi keuangan secara otonom dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk pembangunan desa telah diberikan kepada administrasi desa.

Keuangan desa meliputi aset berupa uang atau barang yang terkait dengan penggunaan wewenang desa, serta hak dan kewajiban yang dapat dikuantifikasi dalam bentuk moneter. Pengelolaan dan akuntansi pendapatan desa, transfer, serta sumber bantuan hukum lainnya berada di bawah kewenangan pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa juga menekankan akuntabilitas dan keterbukaan untuk memenuhi tujuan pemerintahan, khususnya dengan memberikan akses kepada publik terhadap informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah desa.

Menurut Khasanah, A., N., dkk. (2022), transparansi merupakan keterbukaan dalam penyampaian informasi keuangan kepada publik. Salah satu prinsip yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparansi (keterbukaan). Hal ini karena desa menerima dana yang cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga masyarakat membutuhkan akses informasi yang mudah terkait keuangan desa.

Menurut Ermayani, I., dkk. (2024), proses akuntabilitas proyek pembangunan di suatu desa didasarkan pada tahapan dan pengawasan dari BPD, dan dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keterlibatan aktif pemerintah desa dalam menegakkan tanggung jawab terkait hasil tindakan yang berasal dari pengelolaan uang desa merupakan salah satu aspek akuntabilitas. Keterbatasan keuangan yang mungkin terkait dengan tindakan pemerintah merupakan bagian dari akuntabilitas yang dipermasalahkan.

Menurut Faisal (2020), pendapatan desa berasal dari beberapa sumber, seperti Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lain-lain, yang menjadi komponen utama dalam keuangan desa. Seiring dengan meningkatnya dana desa setiap tahunnya, pemerintah desa dituntut untuk menyusun laporan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Laporan tersebut mencakup laporan realisasi kegiatan serta daftar program sektoral yang masuk ke desa. Seluruh laporan pertanggungjawaban kemudian dihimpun dalam LPPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Selain itu, pada akhir tahun anggaran juga disampaikan informasi kepada publik sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa. Seluruh proses pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan partisipatif sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Meskipun demikian, tercatat 791 kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2023, dengan 187 kasus terjadi di sektor desa, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW). Angka-angka ini menunjukkan bahwa tata kelola yang tidak konsisten masih menjadi masalah utama, terutama di tingkat desa. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa kurang akuntabel dan transparan. Banyak masalah yang muncul seringkali disebabkan oleh kurangnya pengawasan, baik dari masyarakat maupun dari dalam pemerintahan desa. Hambatan juga timbul dari ketidaktahuan pemerintah desa tentang pentingnya mematuhi peraturan pengelolaan keuangan desa dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Menurut Musyaffi dkk. (2025), salah satu masalah yang umum terjadi di tingkat desa adalah kesulitan yang dihadapi oleh kepala desa dan perangkatnya dalam

mengelola dana, terutama terkait administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas. Informasi keuangan desa seharusnya mudah diakses oleh masyarakat karena keterbukaan menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan. Namun, ketiadaan media informasi anggaran menunjukkan masih lemahnya implementasi transparansi, sebagian karena aparatur desa belum sepenuhnya memahami pentingnya keterbukaan informasi publik. Rendahnya keterlibatan masyarakat juga menjadi masalah penting karena partisipasi dalam pengambilan keputusan masih kurang memadai. Kondisi di Desa Mulyoagung dapat dikaitkan dengan faktor sosial dan politik, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur musyawarah desa yang disosialisasikan oleh pemerintah desa, sehingga keterlibatan masyarakat masih belum optimal. Oleh karena itu, seluruh pihak terkait perlu mendukung dan mengawasi pengelolaan dana desa agar berjalan sesuai tujuan. Tanpa dukungan tersebut, proses pengelolaan dari perencanaan hingga pelaporan dapat menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memadai. Menurut Suhendri, Hardianto, dkk. (2023), kurangnya layanan dan infrastruktur di masyarakat pedesaan turut memperburuk kondisi tersebut.

Meskipun Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, telah menerima alokasi anggaran desa sejak tahun 2015, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa. Salah satu masalah nyata yang menunjukkan belum optimalnya penerapan keterbukaan adalah tidak tersedianya papan informasi anggaran. Masalah penting lainnya adalah rendahnya keterlibatan masyarakat yang berpengaruh terhadap peningkatan

pertanggungjawaban pemerintah desa. Penelitian ini berupaya mengkaji penerapan konsep tersebut dalam pengelolaan keuangan Desa Mulyoagung. Studi ini juga membahas keadaan, penyebab, serta dampak dari permasalahan yang terjadi di desa tersebut.

1.2. Fokus Penelitian

Implementasi dalam pengelolaan keuangan Desa Mulyoagung secara khusus diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada serta mempertahankan aspek yang sudah berjalan dengan baik, dengan tetap mengacu pada standar yang relevan dalam pengelolaan keuangan desa.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan transparansi dan Pengelolaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau?
2. Bagaimana pandangan pemerintah desa terhadap penanganan tantangan dan hambatan dalam Pengelolaan keuangan desa?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau.
2. Mengidentifikasi pandangan pemerintah desa terhadap penanganan tantangan dan hambatan dalam Pengelolaan keuangan desa.

1.5 Paradigma Penelitian

Paradigma konstruktivis berpendapat bahwa peneliti dan informan bekerja sama untuk membangun realitas sosial. Paradigma ini dipilih karena penilaian terhadap pengelolaan keuangan desa tidak dapat hanya dilakukan melalui data kuantitatif, tetapi juga perlu mempertimbangkan sikap, pengalaman, dan perilaku yang terjadi di lingkungan desa. Penelitian ini didasarkan pada peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa, dengan prinsip utama berupa akuntabilitas dan keterbukaan. Proses yang diteliti mencakup implementasi prinsip-prinsip tersebut pada berbagai tingkatan pengelolaan keuangan desa, yang juga menjadi kontribusi dalam penelitian ini.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Untuk meningkatkan pemahaman serta memperdalam penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan yang relevan, penelitian ini juga menghubungkan teori-teori yang diperoleh dengan kondisi aktual di lapangan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Tempat Penelitian

Digunakan untuk membantu pengelola keuangan desa menilai kinerja dan mengidentifikasi area kelemahan sehingga pengelolaan keuangan desa di masa mendatang dapat ditingkatkan agar lebih baik dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Bagi peneliti

Meningkatkan pemahaman dan keakraban mereka dengan situasi dunia nyata agar dapat menghubungkan apa yang mereka pelajari di perguruan tinggi dengan penerapannya secara praktis.

1.5. Ruang Lingkup

Untuk menjamin proses penelitian serta terhindar dari ketidaksesuaian dalam penyusunan tugas akhir, diperlukan penetapan batasan yang tepat dalam ruang lingkup penelitian. Dalam konteks ini, batasan penelitian akan mempersempit ruang lingkup masalah serta fokus pada aspek relevan.

Lusia Kareri Hara_2022110066

ORIGINALITY REPORT

14%	12%	7%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

10

2

3

4

5

6

7

8

9



docplayer.info	OVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024 Publication	1
Internet Source	garuda.kemdiktisaintek.go.id Internet Source	1 %
Endro Sarino, Marison Sitorus. "PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024 Publication	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
	www.coursehero.com Internet Source	1 %
	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	1 %
	jurnal.fh.unila.ac.id Internet Source	1 %
	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	1 %
	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet Source	1 %

11 jp.feb.unsoed.ac.id
Internet Source

Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 2019
Publication

12 Resindi Elisabet Kaaro, Jenny Morasa, Olivia Sardjono. "Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes pada Desa Munte Kecamatan Likupang Barat", Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2025
Publication

13 Revio Kevin Brandon Karundeng, Stanley Kho Walandouw, Diana Lintong. "Analisis akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus Desa Wiau Lapi Barat, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan)", Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2025
Publication

14 es.scribd.com
Internet Source

15 rama.unimal.ac.id
Internet Source

16 repository.syekhnurjati.ac.id
Internet Source

17 Berlian Putri Maharini. "ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DANA DESA TAHUN 2018 DI DESA BANGUNTAPAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL)",


1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		